

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Munculnya tren bisnis kopi saat ini dapat menjadi kekuatan pendorong di belakang produk ini di seluruh dunia. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyediakan usaha kecil dan menengah (UMKM) kepada seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, dengan serangkaian pembinaan dari hulu hingga hilir untuk optimalisasi kuantitas dan kualitas kopi dalam negeri. Melakukan serangkaian program pengembangan kopi.

Indonesia. sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, banyak masyarakat Indonesia yang tidak ingin menyia-nyaiakan fenomena ini dan mulai berbisnis di bidang kopi, dari mulai kedai kopi atau kafe dan bahkan menjual kopi itu sendiri dari mulai buah kopi, biji kopi, biji kopi yang sudah disangrai, kopi bubuk, hingga kopi siap minum. Bisnis ini pun dilakoni oleh beberapa dimensi masyarakat dari mulai pengusaha, pedagang hingga petani kopi yang ikut mendagangkan hasil taninya.

Tabel. 1.1
Volume Ekspor Kopi Dunia

| Negara | Volume Ekspor per 1000 bags | | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Brazil | 39 470 | 48 095 | 43 484 | 50 826 | 49 152 | 45 342 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Vietnam | 17 825 | 20 000 | 26 500 | 25 000 | 27 500 | 27 500 |
| Colombia | 8 098 | 8 523 | 7 652 | 9 927 | 12 124 | 12 500 |
| Indonesia | 11 380 | 9 129 | 7 288 | 13 048 | 11 667 | 9 000 |
| Ethiopia | 6 931 | 7 500 | 6 798 | 6 233 | 6 527 | 6 625 |
| India | 4 806 | 4 728 | 4 921 | 4 977 | 5 075 | 5 746 |

Sumber : International Coffee Organization, 2022

Kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Ismadewi et al, (2017:2) UMKM secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah kebawah. Perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh UMKM, karena UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah UMKM pada tahun 2019 mencapai 64 juta. Dari jumlah UMKM yang ada, 99.8% merupakan UMKM yang mampu memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berasal dari usaha kecil seperti koperasi UMKM, besar kontribusi yang diberikan yaitu 56% (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2019).

Istilah lain dari UMKM disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara. Di proses pengembangannya, salah satu kesulitan yang dialami UMKM yaitu modal usaha sebagai masalah pendanaannya. Jika tidak melakukan pengembangan usaha dan melakukan inovasi terbaru, maka besar kemungkinan para UMKM tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya. Jika ingin mengembangkan usaha tersebut maka diperlukan tambahan yang cukup besar.

Untuk menjalankan usaha tersebut kebanyakan UMKM menggunakan dana yang berasal dari modal pribadi, dan tidak ada pemisahan antara uang usaha dengan uang pribadi. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha untuk menjadi maju dan lebih baik membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha. Oleh sebab itu, tidak hanya dana pribadi saja yang dibutuhkan tetapi dana yang berasal dari pinjaman pihak ketiga seperti bank, KUR atau sejenis lainnya. Namun, fenomena yang ada pada saat ini banyak UMKM yang hanya menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usaha mereka.

Di Indonesia sudah ditetapkan peraturan yang mewajibkan usaha kecil melakukan pencatatan akuntansi yang baik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Meski telah jelas adanya tentang peraturan, pada kenyataannya pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar masih banyak pelaku UMKM yang tidak melakukannya. Melihat sangat pentingnya penerapan standar akuntansi untuk UMKM maka dari itu IAI selaku organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) menyusun standar akuntansi sesuai dengan karakteristik UMKM. Di Indonesia Standar Akuntansi yang berlaku merupakan SAK yang berbasis IFRS, SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah), SAK Syariah dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Standard akuntansi keuangan untuk bidang usaha yang dikategorikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan SAK-EMKM (Purba, 2019:2). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang terbaru dikeluarkan oleh IAI pada 24 Oktober 2016 dan diberlakukan efektif per 1 Januari 2018. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dan pengembangan usaha (Hetika & Nurul Mahmudah, 2017:2). Pada data akhir tahun 2019 di Kota Medan terdapat 46 jenis UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang terdiri dari beberapa jenis usaha seperti kerajinan, makanan/minuman, pertanian, perdagangan dan jasa.

Di Kota Medan masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan pembukuan sesuai standar yang berlaku. Beberapa hal yang menyebabkan merupakan karena adanya persepsi pelaku UMKM bahwa pembukuan tidak penting untuku sahanya, kurang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi serta tingkat pendidikan yang rendah. Pelaku UMKM tidak menerapkan pembukuannya sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, tetapi pelaku UMKM hanya melakukan pembukuan berupa kas masuk dan kas keluar dalam transaksi usahanya. Dengan adanya pelatihan pencatatan transaksi sesuai akuntansi dan pemahaman tentang SAK EMKM diharapkan pelaku UMKM Kota Medan agar kedepannya bias membuat laporan dengan baik, agar mempermudah UMKM jika ingin melakukan pinjaman ke bank untuk modal dalam mengembangkan usahanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perlunya menerapkan Standard Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) dalam proses pembuatan laporan keuangan
- b. Penerapan standar akuntansi menurut Standard Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada UMKM di Kota Medan
- c. Pelaku UMKM mengalami beberapa kendala dalam menerapkan Standard Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) saat penyusunan laporan keuangannya.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat tersebut perlu untuk dibatasi daerah cakupan penelitiannya. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitiannya hanya yang berkaitan dengan: Penerapan SAK EMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Maga Coffee di Medan).

1.3.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Penerapan SAK EMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Maga Coffee di Medan)”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hal-hal, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan SAK EMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Maga Coffee di Medan).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Pihak tersebut antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, terkhusus untuk ilmu akuntansi keuangan. Serta dapat menjadi ruang belajar yang bernilai positif dan sangat membantu didalam peningkatan kapasitas dan juga pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan ilmu akuntansi.

b. Manfaatpraktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berguna kepada para pengusaha agar kedepannya pemilik usaha secara mandiri

dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan juga diharapkan dapat menjadi saran pembangun bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Isnawan (2012), laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang memberikan informasi keuangan pada suatu perusahaan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Walter (2012:98) dalam bukunya laporan keuangan mengemukakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai, yang dapat meliputi Manajer, Investor, Kreditur dan agen regulator. Sebaliknya pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan seperti apakah akan melakukan investasi dalam atau meminjamkan uang kepada perusahaan.

Selanjutnya menurut Wardiyah (2012:86) di dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah bahwa: “Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi untuk menjelaskan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan dan akan memberikan informasi kepada pihak internal dan pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi.

b. Tujuan Laporan Keuangan

SAK EMKM (2016:3) laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, yang dapat berguna bagi beberapa pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan pemakai laporan keuangan sebagai sumber ekonomi usaha. Pemakai laporan keuangan seperti kreditur dan investor.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Tujuan laporan keuangan menurut Lubis (2017:31) merupakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat untuk sejumlah pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan

pertanggungjawaban yang dilakukan manajemen atas sumber daya yang telah diberikan kepercayaan untuknya. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaporan yang telah dilakukan entitas, dapat memberikan manfaat oleh investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kredit lainnya untuk mengambil keputusan dalam kemampuan untuk menyediakan modal (Donal, 2017:7).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai keuangan dan aset perusahaan yang berguna dalam membuat keputusan untuk menyediakan modal bagi pemakai laporan keuangan.

c. Bentuk-Bentuk Laporan keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas:

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, utang dan modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan posisi keuangan disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan komponen yang ada di laporan posisi keuangan. Kasmir dalam tulisan Mia Lasmi (2016:98), secara lengkap informasi yang disajikan dalam posisi keuangan meliputi:

- a) Jenis-jenis asset atau harta yang dimiliki
- b) Jumlah rupiah masing-masing jenis asset atau harta (assets)

- c) Jenis-jenis kewajiban atau utang (*liability*)
- d) Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang (*liability*)
- e) Jenis-jenis modal (*equity*)
- f) Jumlah rupiah masing-masing jenis modal

Komponen dalam penyusunan laporan keuangan merupakan:

- a) Asset, asset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Asset lancar merupakan uang kas dan asset lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukar menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi dalam periode berikutnya paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal.
- b) Liabilitas, liabilitas merupakan semua liabilitas keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dan utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur.
- c) Ekuitas, ekuitas yaitu hak residu atas asset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.

2) Laporan Laba Rugi

Menurut Dwi Martina (2012:8) laporan laba rugi merupakan laporan yang mengatur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Ada dua unsure dalam laporan laba rugi, yaitu penghasilan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktivas atau penurunan kewajiban perusahaan selama periode tertentu. Penghasilan dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini:

- a) Pendapatan (*revenue*), merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas, seperti penjualan barang dagang, penghasilan jasa (*fees*), pendapatan bunga, pendapatan deviden, *royalty*, dan sewa.
- b) Beban (*expense*), didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban yang menyebabkan penurunan ekonomi (yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan posisi keuangan merupakan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan aliran modal kerja selama periode bersangkutan.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi kas dan operasional, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya dan membayar dividen. Menurut Kieso, dkk (2011) dalam tulisan Mia Lasmi (2016), kegiatan laporan keuangan arus kas melalui tiga jenis aktivitas berikut:

- a) Arus kas dari aktivitas operasional, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih.
- b) Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tidak lancar
- c) Arus kas dari pendanaan, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Pernyataan SAK No.1 dinyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijen dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam pernyataan akuntansi keuangan yang wajar.

Catatan laporan keuangan mengungkap:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b) Informasi yang mewajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangkap penyajian secara wajar.

d. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut Yadiati (2017:6) “unsur-unsur laporan keuangan merupakan simbol-simbol makna yang merepresentasikan realitas kegiatan suatu badan usaha atau informasi semantik yang ingin disampaikan dalam pelaporan keuangan tersebut”. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts*

(SFAC) Nomor 6 tentang “*Elements of Financial Statements*” dalam Yadiati (2017:61) laporan keuangan terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1) Aset (*Asset*)

Aset merupakan manfaat dari sumber daya ekonomi di masa yang akan datang yang cukup pasti yang biasanya diperoleh oleh perusahaan sebagai akibat transaksi yang terjadi di masa lalu.

2) Utang (*liability*)

Utang merupakan pengorbanan sumber ekonomi masa datang yang timbul dan kewajiban perusahaan saat ini untuk mentransfer asset atau memberikan jasa terhadap suatu usaha di masa yang akan datang.

3) Modal (*Equity*).

Modal merupakan asset bersih yang masih ada setelah seluruh asset dikurangi kewajibannya yang merupakan residual interest terhadap asset suatu perusahaan.

a) *Investment by owner*

Investment by owner merupakan kenaikan ekuitas suatu usaha untuk memperoleh atau menambah hak kepemilikan pada perusahaan yang berupa sesuatu yang bernilai yang berasal dari pemilik atau dari perusahaan lain.

b) *Distribution to owner*

Distribution to owner merupakan pengurangan ekuitas akibat adanya pemberian jasa, transfer aktiva atau pelunasan kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik.

c) *Comprehensive income*

Comprehensive income merupakan kenaikan asset bersih perusahaan dalam suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh seluruh transaksi dan kejadian yang ada di perusahaan kecuali dari investasi oleh dan distribusi kepada pemilik.

4) Pendapatan (*Revenue*)

Pendapatan (*revenue*) merupakan setiap cash inflow atau kenaikan aset, penurunan kewajiban atau keduanya, yang terjadi melalui aktivitas utama perusahaan seperti pengiriman barang, produksi barang, penjualan jasa dan aktivitas lainnya.

5) Beban-beban (*Expenses*)

Expenses merupakan setiap *cash outflow*, atau pemakaian asset perusahaan, atau timbulnya asset perusahaan atau kombinasi keduanya dalam aktivitas utama perusahaan yaitu pengiriman barang, produksi barang, penjualan jasa dan aktivitas lainnya.

6) Gains.

Gains merupakan kenaikan asset bersih yang disebabkan oleh transaksi-transaksi yang bersifat insidental dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan kecuali yang berasal dari pendapatan (*revenues*) atau investasi pemilik.

7) Loses

Loses merupakan penurunan asset bersih yang disebabkan transaksi yang bersifat insidental dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan kecuali yang berasal dari distribusi kepada pemilik dan timbulnya beban.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum merupakan biaya historis dan nilai wajar.

- 1) Biaya historis asset merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari asset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- 2) Nilai wajar merupakan jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.1.2 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

UMKM memiliki defenisi masing-masing seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008, yaitu:

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
- 2) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Secara umum ciri-ciri UMKM merupakan manajemennya yang berdiri sendiri, modal disediakan sendiri oleh pemilik UMKM, daerah pemasarannya masih pada daerah lokal, asset perusahaannya kecil serta jumlah karyawan yang dipekerjakannya terbatas. Asas pelaksanaan UMKM merupakan kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

b. Kriteria UMKM

Kekayaan dari hasil penjualan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, menyebutkan kriteria UMKM yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Kriteria Usaha Kecil
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 30.000.000 sampai yang paling banyak Rp. 2.500.000.000.
- 3) Kriteria Usaha Menengah
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000

Jumlah tenaga kerja UMKM kurang dari 1xx orang, dengan rincian sebagai berikut: usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari 1-4 orang tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari 5-9 tenaga kerja, usaha menengah 20-99 tenaga

kerja dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 tenaga kerja atau lebih

c. Klasifikasi Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat kriteria, diantaranya:

- 1) *Livelihood Activities*, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya merupakan pedagang kaki lima
- 2) *Micro Enterprise*, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- 4) *Fas Moving Enterprise*, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar (UB)

d. Kebutuhan Arah Pengembangan UMKM

Sektor UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Beberapa potensi besar sektor UMKM merupakan:

- 1) Tidak banyak memiliki ketergantungan pada factor eksternal semisal gejolak perekonomian dunia, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya.
- 2) Selang waktu produksi (time lag) UMKM relatif singkat.

- 3) Keperluan modal UMKM, khususnya UMKM relative singkat
- 4) Sebagian besar usaha UMKM merupakan kegiatan padat karya dan mampu mendayagunakan skill dan semi skill workers
- 5) Penciptaan lapangan kerja pada tingkat biaya modal yang rendah.
- 6) Kemampuan dalam forward dan backward linkage antara berbagai sector.
- 7) Memiliki peluang besar didalamnya bagi pengembangan dan adaptasi berbagai teknologi.
- 8) Mengisi berbagai ceruk pasar yang tidak efisien bagi perusahaan besar dan
- 9) Sebagai penopang eksistensi perusahaan skala besar

Tinjauan historis perkembangan kebijakan UMKM dari era prakolonial hingga sekarang menunjukkan bahwa sektor UMKM ini sering kali sekedar menjadi objek yang dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan penguasa. Pasca runtuhnya rezim orde baru, sebenarnya ada upaya untuk memberikan prioritas pengembangan UMKM. Namun sayangnya, pemerintah terkesan kurang serius untuk mewujudkan hal tersebut. Inkonsistensi dan sikronisasi kebijakan masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM.

Persoalan ini tidak sekedar terjadi pada kementrian di level pemerintah pusat, tetapi antara kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali tidak sejalan. Selain itu di Era demokrasi yang dilaksanakan dengan pemilihan langsung, sektor UMKM sering kali hanya dijadikan komoditas politik para politisi dan elite politik untuk merengkuh dan melegitimasi kekuasaan mereka. Banyak muncul asosiasi bisnis,

tetapi tidak mencerminkan wadah perjuangan sosial dan ekonomi pelaku UMKM.

Menurut Tara dalam tulisan Budiarto, dkk (2015) bahwa kebijakan dasar pengembangan UMKM sekurang-kurangnya harus memuat beberapa aspek berikut ini:

- 1) Pemberian preferensi kepada usaha kecil dan menengah dalam mengikuti semua tender-tender pemerintah, ikut serta dalam semua bidang usaha dan pemilikan usaha besar serta perusahaan-perusahaan publik dan akses yang mudah kepada sumber-sumber pembiayaan dan perizinan usaha.
- 2) Pemerintah perlu mendirikan lebih banyak lembaga-lembaga pembiayaan usaha kecil dan menengah untuk memperluas pelayanan dan dukungan pembiayaan kepada sektor UMKM
- 3) Usaha kecil dan menengah di bina oleh Negara dengan pembinaan yang proaktif dan edukatif melalui badan otonom yang khusus ditugaskan untuk itu.
- 4) Kebijakan pemberian suku bunga rendah dilindungi oleh undang-undang semacam pembaruan terhadap *worker ordonatin* 1926 yang pernah diterapkan di zaman penjajahan Belanda, dimana ditetapkannya suku bunga tertinggi yang dapat dibebankan kepada usaha kecil, menengah dan besar merupakan 6% (enam persen).
- 5) Keterkaitan usaha kecil, menengah dan besar dalam rangka persaingan yang sehat dan jujur diatur dengan undang-undang agar tercipta sinergi nasional

dan efisiensi serta keterbukaan dalam ekonomi nasional yang menghasilkan perusahaan-perusahaan yang tangguh bersaing

e. UKM dan Informasi Keuangan

Informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan merupakan kebutuhan bagi setiap kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, apakah UKM membutuhkan atau tidak? Sementara itu, banyak UKM yang berhasil tanpa harus memiliki informasi keuangan yang modern. Apakah itu berarti laporan keuangan tidak dibutuhkan oleh UKM? Sebenarnya, dengan informasi keuangan dapat diperkirakan perkembangan usaha kedepan. Beberapa kemungkinan muncul berdasarkan informasi keuangan yang ada. Pertama, usaha memang sudah tidak memiliki harapan lagi. Informasi keuangan memperlihatkan bahwa kerugian selalu terjadi, termasuk deficit kas. Ini berarti usaha selalu rugi dan pemilik harus senantiasa menambahkan dana.

Kedua, usaha kemungkinan mandek. Dari informasi keuangan jelas terlihat bahwa tidak ada keuntungan yang di peroleh dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha saja. Usaha memang dapat terus berjalan, namun tidak akan terjadi pengembalian modal investasi. UKM perlu memperhitungkan jika investasi dialihkan ketempat lain untuk mencari kemungkinan usaha tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Ketiga, usaha memang berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Keuntungan cukup di peroleh, namun tidak dalam bentuk kas. Dengan kata lain, masih banyak tagihan yang perlu dipercepat

pengembaliannya sehingga keuntungan diatas kertas dapat direalisasi menjadi keuntungan kas.

Keempat, bias saja terjadi usaha yang rugi, namun uang kas tetap melimpah. Dalam hal ini perlu diwaspadai adanya tagihan utang yang jatuh tempo dalam waktu yang bersamaan. Cepat atau lambat kerugian akan berpengaruh pada kas. Kelima, keuntungan diperoleh dan dapat dikumpulkan dalam wujud kas. Ini merupakan kondisi ideal yang harus dicapai. Umumnya pengusaha UKM fokus pada kegiatan produksi dan pemasaran saja. Masih lekat anggapan bahwa sepanjang produksi masih dapat dilakukan dan penjualan masih terjadi maka UKM akan berjalan.

Produksi informasi keuangan masih dianggap terlalu mewah dan tidak sebanding dengan kegunaannya. Anggapan ini semakin sulit diubah karena memang tidak ada upaya yang signifikan untuk memberikan perhatian khusus tentang informasi keuangan yang dibutuhkan dan dapat diproduksi oleh UKM. Kebutuhan, seperti apa dan bagaimana memproduksinya, masih disamaratakan dengan usaha komersial lainnya. Padahal UKM jenis memiliki karakteristik yang unik dan spesifik. Informasi keuangan yang akan dihasilkan untuk kegiatan operasi tidak terbatas hanya pada laporan keuangan. Informasi keuangan untuk UKM secara garis besar akan dimulai dari penilaian kekayaan investasi, berbagai metode yang di gunakan untuk menilai layak tidaknya suatu investasi diambil akan merupakan pengetahuan dasar bagi UKM.

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

(SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan atau SAK merupakan pernyataan PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya dilansir. Menurut Jurnal.id, Indonesia memiliki 4 (empat) tipe SAK yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. SAK (Standar Akuntansi Keuangan)
- b. SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
- c. PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah)
- d. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

IAI selanjutnya menyusun SAK yang lebih sederhana dari SAK ETAP yaitu SAK EMKM pada pertengahan 2015 menurut welojo.id. Hal ini dikarenakan masih banyaknya UMKM di Indonesia yang belum mampu untuk membuat serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2016) Entitas Mikro Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi defenisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 2016, menyusun SAK EMKM sebagai standar laporan keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Laporan keuangan yang tersaji menurut SAK EMKM memiliki tujuan yang sama dengan laporan keuangan yang berlaku umum. SAK EMKM memiliki Karakteristik yaitu:

- a. Standar akuntansi yang berdiri sendiri (tidak mengacu pada SAK umum)
- b. Mayoritas menggunakan konsep biaya historis
- c. Hanya mengatur transaksi umum di lakukan usaha kecil dan menengah
- d. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum

Penyusunan Laporan Keuangan ada beberapa karakteristik dari segi kualitatif yaitu:

- a. Dapat dipahami kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ialah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.
- b. Relevan agar dapat bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi dapat dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menengaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- c. Materialitas Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan
- d. Keandalan agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa-apa yang seharusnya disajikan.
- e. Substansi mengungguli bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.
- f. Pertimbangan sehat Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat serta penjelasan peristiwa dan melalui penggunaan pertimbangan sehat mengandung unsure kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak tersajikan lebih rendah.
- g. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan dan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar oleh karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

- h. Dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi serta kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antara entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda.
- i. Tepat Waktu. Agar relevan, informasi pada laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi oleh para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
- j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

SAK EMKM (2016)

2.1.4 Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi yang mengenai asset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur didefinisikan di dalam posisi keuangan sebagai berikut:

- a. Asset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas
- b. Liabilitas merupakan kewajiban dini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi
- c. Ekuitas merupakan hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.

- a. Penghasilan (*income*) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- b. Beban (*expense*) merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan asset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berasal atau disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal.

Dasar pengukuran unsure laporan keuangan dalam SAK EMKM merupakan biaya Historis. Biaya historis suatu asset merupakan seberapa besar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas merupakan sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Pengukuran unsure laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria:

- a. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos-pos asset liabilitas, penghasilan, dan beban dapat dipastikan akan mengalir kedalam atau keluar dari entitas
- b. Pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dan andal pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian yang wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representative, tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode laporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari:
 - 1) Laporan posisi keuangan akhir periode Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut: Kas dan setara kas. Piutang. Persediaan. Asset tetap. Utang usaha. Ekuitas

- 2) Laporan laba rugi selama periode Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos berikut: Pendapatan atau penjualan, beban keuangan, beban pajak dan beban lainnya.
- 3) Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dari rincian pos-pos tertentu yang relevan Catatan atas laporan keuangan memuat:
 - a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM
 - b) Ikhtisar kebijakan akuntansi
 - c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.1.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan sederhana yang berupa neraca saldo, laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca :

a. Neraca saldo

| No | Nama akun | Debet | Kredit |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Kas | Rp. xxxx | |
| 2 | Piutang usaha | Rp. xxx | |
| 3 | Perlengkapan | Rp. xxx | |
| 4 | Sewa dibayar dimuka | Rp. xxxx | |
| 5 | Peralatan | Rp. xxx | |
| 6 | Hutang usaha | | Rp. xxxxxx |
| 7 | Modal | | Rp. xxxxxx |
| 8 | Prive | Rp. xxxx | |
| 9 | pendapatan | | Rp. xxxx |
| 10 | Beban gaji | Rp. xxxx | |
| 11 | Beban lain-lain | Rp. xxxx | |
| | | Rp. xxxx | Rp. xxxx |

Sumber: Mulyadi (2016)

b. Laporan laba rugi

| | | |
|-------------------|------------|---------------|
| Pendapatan: | | |
| Pendapatan | Rp. xxx.xx | |
| Jumlah pendapatan | | Rp. xxx.xx |
| | | |
| Beban usaha: | | |
| Beban gaji | Rp. xxx.xx | |
| Beban lain-lain | Rp. xxx.xx | |
| Jumlah beban | | (Rp.x.xxx) |
| Laba bersih | | Rp. x.xxx.xxx |

Sumber: Mulyadi (2016)

c. Laporan perubahan modal

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Modal awal | | Rp. x.xxx.xxx |
| Laba bersih | Rp. x.xxx | |
| Prive | (Rp. xx.xxx) | |
| Penambahan modal | | Rp. xxx.xxx |
| Modal akhir | | Rp. xxx.xxx |

Sumber: Mulyadi (2016)

d. Neraca

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| Aktiva | | | |
| Aktiva lancar: | | | |
| Kas | Rp. x.xxx.xxx | | |
| Piutang usaha | Rp. xx.xxx | | |
| Perlengkapan | Rp. xx.xxx | | |
| Sewa dibayar dimuka | Rp. xxx.xxx | | |
| | | Rp. xxx.xxx | |
| Aktiva tetap: | | | |
| Peralatan | Rp. xx.xxx | | |
| | | Rp. xx.xxx | |
| Total aktiva | | | Rp. xxx.xxx |
| | | | |
| Pasiva | | | |
| Hutang usaha | Rp. xx.xxx | | |
| Modal akhir | Rp. xx.xxx | | |
| | | | Rp. xxx.xxx |

Sumber: Mulyadi (2016)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul Penelitian | Teknik Analisa Data | Hasil |
|----|------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | Yuli Rawun (2019) | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado) | Metode deskriptif | Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim, tidak ada satu pun UMKM yang Menyusun Laporan Keuangan. Dikarenakan tidak mengertinya cara penyusunan laporan keuangan dan tidak adanya keinginan dari pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang ada. |
| 2 | Rizky Aminatul Mutiah (2019) | Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM | Metode deskriptif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki masalah dalam menyusun laporan keuangan, yaitu terbatasnya pemikiran tentang mengelola laporan keuangan dan terbatasnya jumlah SDM yang tidak memadai dalam menyusun laporan keuangan. |
| 3 | Hermi Sularsih (2019) | Penerapan Akuntansi Sak Emkm Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Kecamatan Lowokwaru Kota | Metode deskriptif | Hasil penelitian pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana untuk mencatat keuangan usaha. Alasan para UMKM tidak menyusun |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------|--|
| | | Malang | | laporan keuangan karena akuntansi dianggap rumit dan sulit untuk diterapkan serta keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan. |
| 4 | Hendy Widiastoeti (2020) | Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm Kampung Kue Di Rungkut Surabaya | Metode deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan Proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan tiap-tiap UMKM masih sederhana, Kendala yang dialami oleh masing-masing UMKM yaitu SDM dalam mengelola keuangan, tingkat kompetensi dan ruang lingkup organisasi yang kecil. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM pada UMKM Kampung Kue diantaranya UD. Pawon Kue, UD. Putri, Dieva Cake, Aish Cake terdiri dari laporan posisi keuangan sesuai SAK EMKM, Laporan laba rugi dan Catatan atas laporan keuangan. |
| 5 | Rif'atul Fitriyyah (2020) | Penerapan akuntansi SAK EMKM dalam penyusunan laporan | Metode deskriptif | |

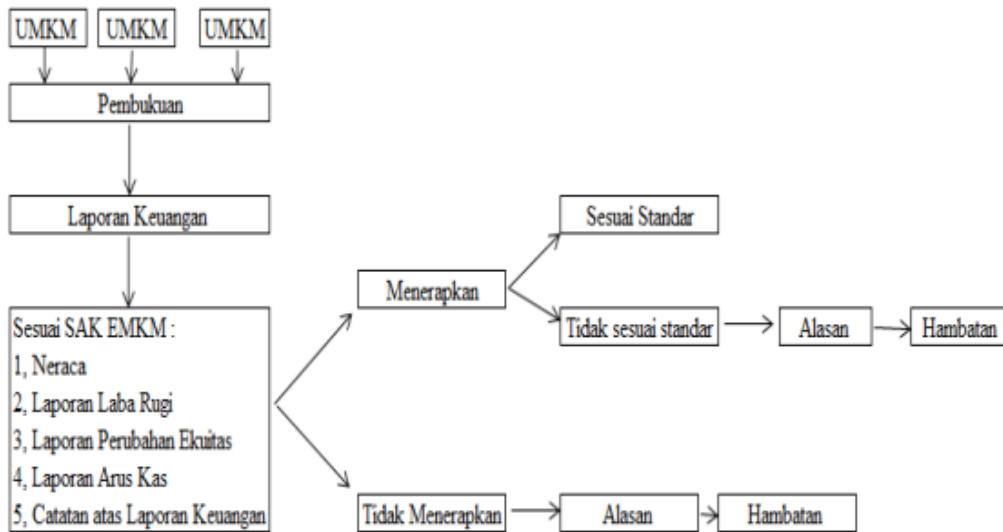
| | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|---|
| | | keuangan studi kasus pada usaha sayangan di Desa Kebakalan | | |
| 6 | Firman Maulana (2018) | Penerapan penyusunan laporan keuangan pada umkm berdasarkan sak emkm | Metode deskriptif | Penyusunan Laporan Keuangan ini dapat digunakan pada saat UMKM Salome Fenomenal ketika sudah memiliki tenaga kerja dan memiliki omzet yang lebih besar, ataupun pada saat menginginkan mengakses permodalan. |
| 7 | Hendy Satria (2020) | Sak Emkm :Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah | Metode deskriptif | Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa CV. Mitra Dinamis hanya membuat laporan keuangan berbentuk invoice. Sehingga, hal tersebut belum sesuai dengan SAK EMKM yang mensyaratkan laporan keuangan lengkap terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). |
| 8 | Priskila Ajo Liasari (2020) | Analisis-Penerapan-Sak-Emkm-Pada Laporan-Kuangan-Umkm-Di-Kota-Medan | Metode deskriptif | Hasil penelitian Pembukuan yang dilakukan pada UMKM masih sebatas laporan bisnis yang merupakan laporan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | | keuangan, tapi entitas menganggapnya sebagai laporan keuangan. |
| 9 | Alysa Valentina Sandi (2021) | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan A.D.D Tour & Travel | Metode deskriptif | Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan masih sangat sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan di dalam buku pemasukan kas dan pengeluaran di buku pengeluaran kas. Pada bulan Maret 2020, ada 43 transaksi penerimaan kas dan 5x transaksi pengeluaran kas yang dicatat oleh perusahaan. |
| 10 | Lisa Fitriani Rahman | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Sak Emkm) Pada Umkm Di Kota Padang | Metode deskriptif | Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) telah dilakukan dengan baik oleh usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Padang Barat, meskipun dengan melakukan pencatatan dengan cara yang sederhana |

Sumber: data diolah Peneliti, 2022

2.3 KerangkaBerpikir

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, maka secara sistematis dapat dibuat kerangka berpikirnya sebagai berikut:



Gambar 2.1.
KerangkaKonseptual

Penjelasan tentang model kerangka berpikir diatas merupakan pertama dipilih UMKM apa yang ingin dijadikan untuk objek penelitian. Setelah itu ditentukan akan melakukan penelitian tentang UMKM Maga Coffee di Medan selanjutnya penulis mencari tahu tentang pengetahuan dan pengalaman akuntansi yang diketahui oleh pelaku UMKM Maga Coffee di Medan selanjutnya peneliti mencari tahu pelaku UMKM tersebut sudah menerapkan akuntansi dan pembukuan atau belum. Jika UMKM di Maga Coffee sudah membuat laporan keuangan, maka akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau belum. Jika belum menerapkan sesuai dengan SAK EMKM dianalisis apakah penyebab sehingga tidak melakukan pembukuan sesuai dengan standar. Setelah dievaluasi mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), selanjutnya dianalisis kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM Maga Coffee di Medan.